

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Diakhir tahun 2019 dunia dihadapkan dengan ancaman keamanan kesehatan yang membahayakan keselamatan manusia yang disebabkan oleh Covid-19 dan bertransisi menjadi suatu pandemi global. Dengan adanya Covid-19 memperlihatkan tata kelola kesehatan secara global maupun nasional yang kurang siap dalam menghadapi pandemi Covid-19. Menghadapi pandemi Covid-19 tidak dapat dilakukan dengan satu negara saja, tetapi membutuhkan kerjasama antar negara, dan bahkan aktor diluar negara atau disebut non-negara.

Indonesia menjadi negara yang harus menghadapi pandemi Covid-19, pada awal pandemi Covid-19 menjadi suatu tantangan bagi pemerintah untuk bisa menangani kasus pasien Covid-19 yang setiap harinya bertambah. Vaksinasi Covid-19 menjadi upaya global untuk mengurangi angka kasus terkonfirmasi Covid-19. Dengan kompleksitas situasi pandemi Covid-19 yang berdampak kepada kehidupan manusia dan keamanan kesehatan masyarakat Indonesia. Pemerintah melakukan upaya untuk memperoleh vaksin Covid-19 menggunakan diplomasi kesehatan global yang salah satunya dengan mekanisme multilateral melalui Covax Facility.

Diplomasi kesehatan global Indonesia dengan Covax Facility berbentuk komunikasi melalui pertemuan dari Indonesia dengan pihak Covax Facility yang diwakili oleh CEO Gavi dan Direktur Jenderal WHO. Indonesia melakukan diplomasi kesehatan global untuk pengadaan vaksin Covid-19 yang akan digunakan untuk vaksinasi Covid-19 dalam membentuk *herd immunity*. Peran diplomasi kesehatan global untuk memperoleh vaksin Covid-19 melibatkan aktor nasional sebagai upaya kolektif dari beberapa kementerian dan lembaga pemerintah. Kementerian Luar Negeri menjadi garda terdepan untuk membangun hubungan diplomatik dan komunikasi untuk memperoleh vaksin Covid-19, dengan aktor internasional.

Dalam pengadaan vaksin Covid-19, Covax Facility memberikan vaksin Covid-19 secara bijaksana kepada Indonesia, dalam hal ini disesuaikan dengan peraturan dari Covax facility untuk seluruh negara yang tergolong *middle-income dan lower-income*, bahwa Indonesia akan mendapatkan 20 persen dan disesuaikan dengan jumlah populasi. Sinergi untuk menciptakan keamanan kesehatan dari ancaman Covid-19 melalui diplomasi kesehatan global, dapat dikatakan suatu kepentingan nasional yang dicapai untuk kesehatan yang baik. Selain itu, Indonesia memiliki peran di tingkat global dalam komitmennya sebagai negara yang bergabung ke dalam Covax Facility, dan menjadi negara dengan kategori AMC atau *middle-income dan lower-income* dalam mendorong kesetaraan untuk pengadaan vaksin Covid-19 di dunia.

Bahwa diplomasi kesehatan global merupakan hal yang baru, ketika negara-negara mengalami putus komunikasi secara langsung tatap muka. Dengan adanya pandemi Covid-19 merubah cara komunikasi yang biasanya bertemu langsung atau bertatap muka, tetapi harus menghadapi tantangan melalui aplikasi digital, sebagai salah satu syarat untuk mencapai kepentingan nasional. Dilengkapi dengan digital diplomasi menjadi pelengkap sebagai bagian dari *policy innovation* dan *institutional adaptation*. Bagaimana negara dan *stakeholder* yang terlibat harus memanfaatkan digital dengan mealth sumber daya manusia agar fasilitas digital dapat digunakan. Karena melalui digital dapat menyampaikan informasi mengenai perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia maupun di setiap negara-negara (Bjola, 2015).

Jadi, diplomasi kesehatan global berbicara tentang pertukaran informasi, kepentingan kemanusiaan lebih tinggi daripada politik dan ekonomi, dapat digunakan melalui multi jalur, dan melintasi batas negara secara global, regional, dan nasional (Kickbusch, 2013). Dapat dikatakan bahwa kasus Covid-19 yang menjadi pandemi adalah masalah kesehatan yang melintasi batas negara, dan dibutuhkannya rasa kemanusiaan untuk bersama-sama memutus penyebaran Covid-19. Covax Facility suatu inisiatif yang telah membantu negara-negara di dunia untuk pengadaan vaskin Covid-19, dan meminimalisir distribusi vaksin Covid-19 yang tidak merata.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Praktis

Covid-19 yang terjadi di Indonesia memperlihatkan kurang siapnya pemerintah dalam menangani kasus masalah kesehatan yang telah menjadi pandemi global. Dalam hal ini menjadi pengalaman untuk Indonesia membangun sektor kesehatan yang lebih baik, dan untuk mengantisipasi sewaktu-waktu adanya masalah kesehatan yang tidak dapat diprediksi, pemerintah sudah memiliki sumber daya yang menunjang untuk memitigasi atau mengurangi dampak buruk yang akan terjadi. Diplomasi kesehatan global yang menjadi salah satu instrumen kebijakan luar negeri sangat berperan untuk menciptakan keamanan kesehatan akibat ancaman Covid-19.

Diplomasi kesehatan global ditujukan untuk menjalin komunikasi dan bersinergi dalam berinteraksi dengan aktor di arena diplomasi yang terjalin antara Indonesia dengan Covax Facility. Melalui Covax Facility untuk memperoleh vaksin Covid-19 merupakan hasil upaya Indonesia di tingkat multilateral untuk mengimplementasikan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat. Vaksinasi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat, perlu adanya sosialisai ke publik untuk meyakinkan masyarakat, bahwa vaksin Covid-19 telah melalui standar regulasi yang ter-legalisasi untuk pemakaiannya.

6.2.2 Saran Teoritis

Diplomasi kesehatan global menjadi hal yang baru sejak abad ke-21, yang mana memiliki keselarasan dengan keamanan kesehatan untuk melindungi manusia dari ancaman masalah kesehatan, dan melalui diplomasi jadi penghubung menjalin interaksi antar aktor. Dapat dikatakan melalui kasus Covid-19 yang meng-global diplomasi kesehatan global dan keamanan kesehatan memiliki peranan penting untuk menangani dampak buruk pandemi Covid-19, yang mana ditujukan untuk menjaga stabilitas negara agar menciptakan keamanan kesehatan.

Dalam situasi pandemi Covid-19 dapat didukung dengan diplomasi digital. Menurut Marcus Holmes melalui digital menjadi suatu strategi internasional yang digambarkan melalui mekanisme *top-down structural exogenous shocks* dan *bottom-up incremental endogenous shifting*, dapat dikatakan melalui diplomasi dapat memberikan respon yang efektif dari negara untuk masyarakat mengenai Covid-19 (Bjola, 2015). Dalam situasi pandemi Covid-19 yang mengalami keterbatasan untuk berkomunikasi secara langsung dan tatap muka, pemerintah dapat memperkuat diplomasi digital melalui sosial media untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai perkembangan hal-hal yang berhubungan dengan Covid-19.